



Semua Wajib Pakai Masker!

Jangan pernah lepas saat bertemu orang lain.

Bupati Sleman Minta Warga Tidak Mudik pada Libur Natal dan Tahun Baru

SLEMAN - Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo mengeluarkan sejumlah kebijakan kepada warganya, termasuk larangan mudik pada libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 dari dan ke Sleman untuk mencegah kluster penularan COVID-19.

"Untuk menjaga situasi pandemi COVID-19 di Sleman agar tetap kondusif, warga Sleman yang perantau maupun yang di rantau diimbau agar tidak mudik saat libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Kegiatan silaturahmi masih bisa kita lakukan secara virtual. Mari jaga diri, lingkungan, saudara kita," kata Kustini Sri Purnomo di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (22/11).

Pemerintah pusat kembali akan mengetatkan pembatasan mobilitas masyarakat menjelang libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Hal itu dilakukan dengan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 untuk seluruh wilayah Indonesia akhir Desember hingga awal Januari.

Kebijakan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat memimpin Rapat



Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo.

Koordinasi Tingkat Menteri Mengantisipasi Potensi Peningkatan Kasus COVID-19 pada Libur Natal-Tahun Baru, secara daring, Rabu (17/11/2021).

Bupati Sleman juga meminta warga setempat tidak menggelar acara yang berpotensi menimbulkan kerumunan pada saat pergantian tahun baru. "Dalam rangka pengecatan ini, diimbau masyarakat tidak menggelar kegiatan yang berpotensi terjadi kerumunan dan penularan COVID-19. Jadi, akhir tahun tidak perlu ada pesta dan acara," katanya.

Menurut dia, Pemkab Sleman saat ini tengah berupaya maksimal menangani COVID-19 demi keamanan dan kenyamanan masyarakatnya. Upaya ini terlihat dari

mulai turunnya angka kasus positif harian.

"Sebelumnya memang sempat naik karena kluster takziah dan home industri tahu. Tapi hal itu sudah berhasil kita tekan, dan tentu kita jadikan evaluasi agar tidak terulang lagi. Intinya kita masih akan sangat berhati-hati," katanya.

Kustini berharap, warga Kabupaten Sleman bisa terus menjaga kedisiplinan untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. "Saat ini penting bagi kita menjaga kesadaran kolektif untuk mencegah terjadi penularan selama pandemi COVID-19. Lebih-lebih penularan terjadi karena adanya intensitas sering bertemu dan interaksi masyarakat dengan skala besar," katanya. (ANTARA)

Presiden Beri Tiga Arahan Cegah Ledakan COVID-19 Seperti Eropa

JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan Presiden Joko Widodo memberikan tiga arahan pada jajaran menternya untuk mencegah supaya tidak terjadi ledakan kasus COVID-19 seperti yang terjadi di Eropa sekarang ini.

"Bapak Presiden jelas minta jangan sampai yang terjadi di Eropa terjadi di Indonesia, harapan beliau satu, percepat vaksinasi," kata Budi dalam konferensi pers mengenai perkembangan situasi pandemi COVID-19 di Indonesia yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin (22/11).

Yang kedua, lanjut Budi, Presiden meminta agar semua pihak jangan pernah lengah mengenai protokol kesehatan terutama pada periode libur Natal dan Tahun Baru. "Ketiga, monitor dengan baik dengan laboratorium genome sequenc-

ing, bagaimana pergerakan mutasi yang datang dari luar negeri maupun mutasi yang juga terjadi dalam negeri," kata Budi.

Menkes mengatakan saat ini di Indonesia mutasi varian Delta sudah ditemukan lebih dari 25 jenis, baik turunan pertama varian Delta maupun turunan kedua varian tersebut.

Sebelumnya Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito menerangkan pemerintah melakukan sejumlah strategi dalam mencegah terjadinya lonjakan kasus di akhir tahun.



Menkes Budi Gunadi Sadikin.

Beberapa di antaranya adalah pemberlakuan aturan perjalanan yang baru ditujukan untuk menjamin orang yang bepergian dalam keadaan sehat dan terlindung dari risiko penularan virus corona, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 3 yang akan diterapkan di seluruh wilayah Indonesia

pada 24 Desember.

Selanjutnya, mengintensifkan pengawasan penerapan protokol kesehatan di fasilitas publik hingga ke tingkat komunitas, menghapus cuti bersama Natal dan Tahun Baru serta pelarangan cuti di akhir tahun bagi aparatur sipil negara, TNI-Polri, karyawan BUMN, dan swasta. (ANTARA)

Satgas COVID-19: Prokes Terus Diperketat Meski Kasus Positif Menurun

JAKARTA - Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19 Sonny Harry mengatakan penerapan protokol kesehatan (prokes) terus diperketat, dipantau melalui aplikasi Peduli Lindungi, meski kasus positif COVID-19 telah menurun.

"Kenapa kita bisa mempertahankan kasus rendah? Karena ketika kita mulai melonggarkan aktivitas, karena level PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) terus turun, aktivitas dilonggarkan, mobilitas meningkat, tapi prokes justru diperketat," katanya dalam webinar 'Jangan Halu, Pandemi Belum Berlalu' yang dipantau di Jakarta, Senin (22/11).

Di negara lain ketika penyebaran COVID-19 mulai bisa dikendalikan, kasus positif COVID-19 melandai, pelonggaran aktivitas diikuti oleh pelonggaran

penerapan prokes. Akibatnya negara tersebut kembali mengalami lonjakan kasus positif COVID-19. "Satgas COVID-19 bidang perubahan perilaku pun terus berupaya membangun kesadaran masyarakat. Saat ini alhamdulillah nilai kepatuhan masyarakat masih tinggi," katanya.

Indonesia juga perlu mempertahankan pelacakan dan pengetesan COVID-19 meski kasus positif tengah landai. Menurut Sonny, beberapa negara cenderung mengurangi pelacakan dan pengetesan saat kasus sedang landai. "Kalau kita justru meningkatkan 'testing' (pengetesan) dan 'tracing' (pelacakan) agar kita bisa menemukan secepat-cepatnya orang yang terkonfirmasi positif dan menghindari penularan," kata dia.

Pemerintah juga akan menggencarkan

vaksinasi COVID-19 agar segera mencapai target. Saat ini, 89 juta orang telah mendapat vaksin dosis lengkap atau sekitar 43 persen dari 208 juta penduduk yang ditarget pemerintah. "Untuk dosis pertama, udah capai 134 juta orang. Kalau dari cakupan penduduk Indonesia, jumlah orang yang sudah divaksin 134 juta ini setara 50 persen dari jumlah penduduk, tapi kalau dari target vaksinasi, ini sudah capai 64 persen," katanya.

Apabila vaksinasi lengkap sudah mencapai 50 persen dari target pemerintah akan mulai vaksinasi anak dan vaksinasi penguat atau dosis ketiga. "Sekarang mobilitas penduduk sudah mulai meningkat, tapi masih lebih rendah dari situasi normal. Ketika kita mulai aktivitas secara masif, maka kita harus pastikan prokes dimaksimalkan dengan baik," katanya. (ANTARA)

Bantu Tunggu Regulasi Terkait Aktivitas Pariwisata pada PPKM Level 3

BANTUL - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, masih menunggu regulasi yang mengatur tentang aktivitas sektor pariwisata saat status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 3 diterapkan pemerintah selama sepekan di akhir Tahun 2021.

"Level 3-nya yang dari 24 Desember sampai 2 Januari itu mungkin tidak sampai menutup aktivitas pariwisata, cuma nanti se-Indonesia di Level 3 ada pembatasan-pembatasan, nah kita menunggu regulasinya," kata Kepala Dinas Pariwisata Bantul Kwintarto Heru Prabowo di Bantul, Senin (22/11).

Kebijakan pemerintah tentang PPKM Level 3 untuk seluruh provinsi di Indonesia itu rencananya diberlakukan mulai 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022, sehingga seluruh daerah baik yang berstatus Level 1 dan 2 seperti yang diterapkan di Bantul ini akan dinaikkan ke Level 3.

Dia mengatakan, informasi yang pihaknya terima dari Pemerintah Daerah (Pemda) DIY melalui pemberitaan media masa, bahwa PPKM level 3 yang akan diterapkan pada sepekan jelang akhir tahun nanti pembatasan tidak sama dengan level 3 yang lalu. "Kita ngadopsi berita yang disampaikan Pak Sekda DIY, bahwa level 3 akhir tahun itu tidak sama dengan Level 3 kemarin bahwa pariwisata tutup, tidak boleh buka, jadi belum ada aturan yang melarang bahwa pariwisata tidak boleh buka," katanya.

Dengan demikian, kata dia, bisa jadi walaupun DIY masuk



Kepala Dinas Pariwisata Bantul Kwintarto Heru Prabowo.

PPKM Level 3 masih ada aktivitas wisata dengan pembatasan-pembatasan yang lebih ketat, atau kapasitas diperkecil sebagai pengendalian pandemi COVID-19 pada libur akhir tahun. "Tetapi pembatasan-pembatasan yang seperti apa kita tunggu regulasi terakhir, karena kan regulasi belum ada. Toh selama ini pariwisata yang buka pun tetap menerapkan protokol kesehatan ketat," katanya.

Kwintarto juga mengatakan, untuk menutup aktivitas masyarakat termasuk pariwisata juga tidak harus menunggu PPKM Level 3 yang akan diterapkan nanti, namun melihat kondisi perkembangan kasus penularan yang berdampak pada pengetatan aktivitas masyarakat. "Kan catatannya juga melihat perkembangan, tidak usah menunggu tanggal 24 Desember, kalau kasus tidak terkendali pasti levelnya naik, tetapi yang level 3 hanya untuk pengendalian agar pembatasan-pembatasan itu dilakukan dengan pola yang ketat," katanya.

Dia juga mengatakan, meskipun ada wacana PPKM Level 3 di akhir tahun, harapannya masyarakat tidak menanggapi secara berlebihan apalagi gelisah, karena sudah ada ketentuannya, sehingga jika memang kasus terkendali aktivitas tetap bisa dilaksanakan dengan tetap protokol kesehatan. "Saya harap untuk masyarakat jangan gelisah dulu, semua ada ketentuannya, wisata kita belum tentu tutup, tapi saya tidak bisa jamin pasti bisa buka, jadi penyikapannya kalau sudah pasti saja, kami harap masyarakat jangan dibuat gelisah," katanya. (ANTARA)

Pekalongan Siaga Kendalikan COVID-19 Jelang Natal dan Tahun Baru

PEKALONGAN - Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, melakukan kesiapsiagaan jajaran kelurahan dalam upaya mengendalikan penyebaran COVID-19 menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2022.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekalongan Sri Ruminingsih di Pekalongan, Senin, mengatakan telah menginstruksikan kepada seluruh lurah untuk memantau sejak dini serta melakukan koordinasi dengan 'stakeholder' terkait.

"Kami minta seluruh lurah sebagai aparat terdekat di tengah masyarakat selalu melakukan koordinasi agar libur Natal dan Tahun Baru dapat dilewati dengan aman dan tertib. Jangan sampai menimbulkan kluster baru COVID-19," katanya.

Ia mengapresiasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang telah

meninisiasi adanya aplikasi Simtrantibum untuk memudahkan koordinasi apabila terjadi pelanggaran atau gangguan ketertiban masyarakat sehingga penanganannya bisa cepat.

"Tentunya dengan adanya aplikasi itu, akan memudahkan petugas melakukan koordinasi dalam upaya pengendalian penyebaran COVID-19 saat Nataru. Aturannya juga sudah jelas baik dari instruksi mendingri, instruksi gubernur, dan instruksi wali kota yaitu harus tetap melakukan antisipasi kerumunan dan meningkatkan kepatuhan prokes," katanya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan Sri Budi Santoso mengatakan dalam upaya pencegahan COVID-19 saat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, pemkot telah mengundang seluruh lurah

dan camat agar bisa melakukan koordinasi persiapan akhir tahun.

Saat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, kata dia, berpotensi terjadi pergerakan massa yang cukup besar atau timbulnya kerumunan massa sehingga berpotensi menimbulkan kerawanan ketertiban dan keamanan, serta penyebaran COVID-19.

Sri Budi Santoso yang akrab disapa SBS mengatakan para lurah maupun petugas trantib senantiasa mencermati wilayahnya masing-masing seperti tempat kos, penghuni baru yang tidak dikenal, dan lokasi rawan di malam hari agar potensi yang muncul bisa diminimalisasi lebih awal. "Hal yang utama lagi, dalam kesiapsiagaan libur natal dan tahun baru ini adalah mencegah penyebaran COVID-19 yang bisa menimbulkan kluster baru," katanya. (ANTARA)



ANTARA NEWS

MENEKAN ANGKA KEMATIAN AKIBAT COVID-19 PADA LANSIA

Angka kematian kelompok lanjut usia atau usia 60 tahun ke atas tercatat hampir separuh dari total kematian akibat COVID-19 di Indonesia. Sejumlah upaya dilakukan untuk menekan kematian COVID-19 pada lansia, seperti vaksinasi.

KETENTUAN VAKSINASI PADA LANSIA

- Melalui screening sebelum divaksinasi.
- Memperhatikan penyakit komorbid individu.
- Melakukan persiapan apabila terjadi kejadian ikutan pascaimunisasi (KIPI).
- Memastikan dapat menjangkau petugas kesehatan.

DATA VAKSINASI NASIONAL

Sasaran	208.265.720
Dosis 1	132.299.728 (63,52%)
Dosis 2	86.508.226 (41,54%)
Vaksinasi Lansia	
Sasaran	21.553.118
Dosis 1	10.633.087 (49,33%)
Dosis 2	6.637.159 (30,79%)

(data Kemenkes per 18 November 2021, 18.00 WIB)

"Sebagai kelompok yang sangat rentan terpapar COVID-19, pemerintah memprioritaskan lansia untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Harapannya dapat mengendalikan angka kesakitan bahkan kematian pada lansia."

Budi Gunadi Sadikin
Menteri Kesehatan

PROPORSI KEMATIAN COVID-19



Sumber: Kemenkes diolah Satgas COVID-19 5 Agustus 2021

LANGKAH MENEKAN ANGKA KEMATIAN LANSIA

Keluarga

- Disiplin menjalankan protokol kesehatan 3M.
- Memantau lansia terkonfirmasi atau bergejala COVID-19 ke layanan kesehatan dan tidak menunda hingga tingkat keparahan tinggi.
- Proaktif memberikan pemahaman kepada anggota keluarga yang berusia lanjut agar mau divaksinasi.

Pemerintah

- Meningkatkan cakupan vaksinasi pada lansia.
- Menambah lokasi layanan sentra vaksinasi agar mudah dijangkau kelompok lansia dan kalangan rentan.
- Melakukan edukasi dan sosialisasi seputar manfaat vaksin COVID-19.